

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan kebutuhan. Menurut Karl Marx dalam Ritzer (2007:181) menyatakan bahwa konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan. Sementara menurut Coser dalam Poloma (1992:110) menyatakan bahwa konflik yang realitas berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi di masyarakat mengenai obyek tertentu dan konflik yang tidak realitas bukan berasal dari tuntutan-tuntutan terhadap obyek tertentu melainkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan konflik dari salah satu pihak.

Potensi konflik terjadi manakala terjadi kontak antar manusia, dalam setiap masyarakat selalu ada peluang sangat besar bagi terjadinya kompetisi dan konflik, karena acap kali hasil konflik itu buruk, maka persepsi mengenai konflik cenderung negatif. Menurut Susan (2009:95) menyatakan bahwa ada dua hal umum untuk mengidentifikasi mengenai sumber atau sebab konflik, yakni (1) konteks terjadinya konflik dan (2) sumber-sumber konflik. Konflik terjadi dalam beragam konteks antar pribadi, komunitas, komunal, regional, dalam negara sendiri hingga antar negara. Dari berbagai macam konteks itulah bersumber konflik karena ketidaksetaraan atau perbedaan disposisi, persepsi, orientasi nilai, sikap, dan tindakan dalam merespons situasi sosial, historis, kesadaran sosial, politik, bahkan situasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian dalam konflik tersebut.

Dengan demikian frekuensi situasi konflik selalu terjadi mulai dari skala kecil sampai skala luas dalam suatu masyarakat antara pelbagai pihak, didorong oleh faktor perbedaan wilayah, etnik, agama dan ekonomi. Semua ini tumbuh karena perbedaan nilai, keyakinan

dan kepercayaan, serta sikap terhadap isu. Menurut Liliweri (2005:264) menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe konflik yakni (1) konflik sederhana, (2) konflik dalam organisasi, (3) konflik berdasarkan sifat, (4) konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses, (5) konflik berdasarkan faktor pendorong, (6) konflik berdasarkan jenis ancaman, (7) konflik berdasarkan apa, kapan, dimana ia terjadi, (8) konflik berdasarkan cara memandang peristiwa atau isu, (9) konflik berdasarkan level pemerintahan.

Anatomi konflik merupakan unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempengaruhi terjadinya konflik yakni penyebab terjadinya konflik, siapa yang berkonflik, bagaimana terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik dan penyelesaian konflik seperti apa yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Dalam memahami konflik diperlukan pemetaan konflik Menurut Wehr dan Bartos (2003:67-68) melakukan pemetaan terhadap konflik yaitu (1) *Specify the context* yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik, (2) *Identify the parties*; menemukan siapa yang menjadi pihak berkonflik, (3) *separate causes from consequences*; memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik, (4) *separate goals from interest*; sasaran selama proses terjadinya konflik dan lebih spesifik, (5) *Understand the dynamics*; memahami dinamika yang terjadi oleh berbagai model tindakan para pihak berkonflik, (6) *search of positive functions*; menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaian, (7) *understand the regulation potential*; memahami aturan legal seperti undang-undang yang dapat menyelesaikan konflik. Dengan adanya anatomi konflik dan pemetaan konflik yang terjadi sehingga memudahkan untuk mengetahui secara spesifik mengenai potensi terjadinya konflik dan solusi yang harus dilakukan terhadap konflik tersebut.

Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke yang memiliki kekayaan alam, suku, etnik, budaya, dan ekonomi. Dengan luasnya wilayah

Indonesia ini tidak terlepas dari gesekan yang terjadi antar individu maupun kelompok yang mengakibatkan terjadinya konflik. Peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia memiliki latar belakang berbeda-beda yakni stratifikasi sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi, stereotipe, kepentingan politik, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai isu/pola konflik sosial pada tahun 2013, 2014 dan 2015 antara lain sebagai berikut: (a) Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta eksek politik 9 kasus. (b) Tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksek konflik politik 4 kasus. (c) Tahun 2015 total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena eksek politik berjumlah 2 kasus.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa setiap tahun terjadi konflik dengan berbagai latar belakang yang ada di berbagai daerah di Indonesia hal ini yang mempengaruhi terjadinya konflik tersebut seperti sara, ormas, sengketa lahan, kesenjangan sosial, kepentingan politik. Dalam hal ini pada tahun 2013 (92 peristiwa konflik), 2014 (82 peristiwa konflik), dan 2015 (26 peristiwa konflik) setiap tahunnya konflik di Indonesia mengalami penurunan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sumatera Utara dianggap sebagai daerah yang cukup kondusif dalam hal kerukunan umat beragama. Namun demikian, tetap saja memiliki potensi konflik yang terjadi di

masyarakat. Berdasarkan hasil dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama, beberapa potensi konflik yang ditemukan di Sumatera Utara, adalah: (1) kesenjangan kesejahteraan sosial penduduk; (2) adakalanya terjadi intervensi terhadap tradisi dan keyakinan keagamaan yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan sekalipun belum sempat berkembang; (3) kekerasan sosial akibat dari kesenjangan sosial maupun sikap budaya; (4) penggunaan idiom atau simbol-simbol secara tidak tepat yang telah menjadi identitas kelompok agama tertentu. Lubis (2005: 249).

Tanjung Balai memiliki luas 6.052 Km² berdasarkan sejarahnya Tanjung Balai termasuk wilayah Kesultanan Asahan sehingga budaya yang ada disana saling memiliki keterikatan dengan daerah sekitar seperti Asahan, Batubara dan Labuhan Batu yang merupakan daerah pemerintahan Kesultanan Asahan. Asisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjung Balai dan karena jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan (*Voorzitter van den Gemeen-teraad*). Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan Assisten Resident, Tanjung Balai juga merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan. Pasca kemerdekaan Tanjung Balai dijadikan Kota Administratif (kotif) untuk wilayah Asahan, Batubara dan Tanjung Balai, ketika pemerintah mulai gencar melakukan pemekaran daerah sehingga daerah tersebut terbagi menjadi tiga yakni Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai dengan demikian masing-masing daerah ini memiliki pendapatan daerah sendiri.

Perkembangan Kota Tanjung Balai dari tahun ke tahun semakin berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di Tanjung Balai, sehingga kota ini telah menjadi kota yang berpenduduk padat. Berdasarkan Kota Tanjung Balai dalam angka tahun 2016 sebaran etnik yakni Etnik Melayu 15,41%, Etnik Jawa 17,06%, Etnik Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Karo) 42,56%, Etnik Minang 3,58%, Etnik Aceh 1,11%, Etnik lainnya sebanyak 20,28% dengan

agama yang dianut Islam 81,99%, Kristen 7,78%, Katolik 1,06%, Hindu 0,08%, Budha 9,0%, Khonghucu 0,02% yang mewarnai kehidupan di masyarakat di Tanjung Balai dengan keberagaman daerah asal, bahasa, dan agama. Berdasarkan sejarah masyarakat Tanjung Balai kebanyakan masyarakat Batak yang merantau menuju kesultanan Asahan yang melepaskan identitas marga mereka dan mengubah menjadi Melayu dan berbaur dengan masyarakat Melayu yang ada di Tanjung Balai namun setelah reformasi masyarakat Tanjung Balai menggunakan marga yang mereka peroleh berdasarkan garis keturunan masing-masing.

Keragaman etnik di Tanjung Balai ini maka berbagai anggota kelompok etnik boleh saja memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara, meskipun mereka anggota komunitas yang berada dalam berbagai lapisan sosial-ekonomi dan situasi geografis yang berbeda. Selain itu, dari sisi budaya tampak bahwa kemajemukan itu dibentuk oleh beragam komunitas, karakteristik, watak dan sikap, baik secara individu maupun kelompok yang menjadi pembeda antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lain.

Kebebasan yang diterima etnik minoritas Tionghoa ketika masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang memberikan kebebasan kepada etnik minoritas Tionghoa untuk mengembangkan bisnis, pendidikan dan penggunaan bahasa mandarin dalam kehidupan sehari-hari, budaya etnik minoritas Tionghoa, dengan adanya kebebasan inilah etnik minoritas Tionghoa semakin mengembangkan usaha dan mulai menguasai sendi-sendi kehidupan yang berada di Tanjung Balai.

Interaksi etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa dapat juga dilihat dari sektor ekonomi yakni etnik minoritas Tionghoa yang berada di Tanjung Balai mampu menjalin hubungan yang baik dengan etnik mayoritas, sehingga mampu menjalin kerjasama dan komunikasi antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa. Hal ini dapat dilihat

dari kepemilikan kapal di Tanjung Balai, dari seluruh kapal yang berada di Tanjung Balai, hanya 1 (satu) kapal yang dimiliki oleh etnik mayoritas.

Etnik mayoritas dari etnik Batak yang telah menjadi etnik Melayu ataupun etnik Batak yang beragama Kristen, sebagaimana yang mengelompok tinggal di daerah tertentu, telah bekerja kepada etnik minoritas Tionghoa sebagai buruh atau "*anak kapal*". Akan tetapi saat ini "*toke-toke*" etnik minoritas Tionghoa yang mempunyai kapal-kapal besar, mencari pekerjanya dari daerah luar Kota Tanjung Balai, karena etnik mayoritas yang kini bertempat tinggal di pinggiran Sungai Silau ataupun di pinggiran Sungai Asahan telah mempunyai sampan sendiri. Sementara itu hanya sedikit orang Kristen yang diambil oleh etnik minoritas Tionghoa sebagai pekerjanya.

Etnik minoritas Tionghoa memiliki pekerjaan sebagai pengusaha atau pemilik modal dengan membuka berbagai macam usaha dan etnik mayoritas menjadi pekerja, interaksi yang dilakukan berjalan dengan baik namun ketika terjadi kesalahan yang dilakukan pekerja maka pemilik toko akan mengucapkan kata-kata kasar dan jika fatal akan diberhentikan.

Dengan melihat pekerjaan yang dilakukan antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa maka muncul persepsi etnik minoritas Tionghoa terhadap masyarakat Tanjung Balai yang lebih banyak bekerja sebagai pegawai atau buruh mereka sehingga adanya peminggiran atau tidak menghargai etnik mayoritas dengan suka hati berbuat dan berbicara kepada etnik mayoritas, sehingga mengakibatkan adanya rasa sakit hati dan ketidaksenangan antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa.

Dengan penguasaan dan perilaku etnik minoritas Tionghoa maka mempengaruhi hubungan harmonis antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa menjadi berkurang. Adanya kesalahpahaman yang disebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dipengaruhi oleh semakin banyaknya etnik minoritas Tionghoa mendirikan rumah ibadah dan kurangnya pengetahuan etnik mayoritas membedakan etnik minoritas Tionghoa yang

beragama Khonghucu dengan etnik minoritas Tionghoa yang beragama Budha, sehingga Kelenteng yang menjadi rumah ibadah orang Khonghucu dianggap mereka rumah ibadah orang Budha. Mereka tidak paham bahwa agama Budha memiliki beberapa aliran yang berbeda, berbeda aliran maka berbeda pula rumah ibadahnya. Semakin banyaknya dibangun rumah ibadah milik etnik minoritas Tionghoa seperti Vihara dan Kelenteng, sehingga berdirinya beberapa Vihara dan Kelenteng ini dianggap berlebihan bagi sebagian etnik mayoritas, sehingga muncullah perasaan bahwa Tanjung Balai telah dikuasai oleh etnik minoritas Tionghoa.

Pemikiran yang menganggap etnik minoritas Tionghoa pendatang yang tinggal di Tanjung Balai namun menguasai perekonomian mulai dari perikanan, pasar, pertokoan, monza dan mendapat kemudahan dari pemerintah jika ingin melakukan urusan kependudukan serta urusan lainnya namun masyarakat pribumi tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah bahkan penyelesaian administrasi dipersulit dan lama sehingga terdapat kecemburuan sosial. Vihara Tri Ratna yang dibangun sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1432 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai dibangun dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirikan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna. Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan satu-satunya Vihara di Kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2.000 orang Umat Budha.

Pada tanggal 30 Mei dan 29 Juni 2010 beberapa ormas yang mengatasnamakan “Gerakan Islam Bersatu” melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai. Mereka mendesak pemerintah menurunkan Patung Budha dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan Islami di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat dan icon dari Tanjung Balai

masyarakat religius yang bernuansa Islami. Menurut penelitian Irwansyah (2013) mengenai potensi keretakan hubungan sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Budha Di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara) menyatakan bahwa penyebab konflik Patung Budha di Vihara Tri Ratna adalah: a) Politik, b) Kecemburuan Sosial, c) Isu Agama, d) Fanatisme dan Simbolisme dan faktor penyebab ini didukung dengan doktrin agama sehingga memunculkan sentimental masyarakat yang selama ini terpendam terhadap etnik Tionghoa dan dilakukan resolusi damai oleh pemuka agama dan pemerintah. Solusi damai yang ditawarkan pemerintah dengan cara mengumpulkan pemuka agama dan membuat kesepakatan damai serta dijanjikan akan dibangun masjid terapung yang terletak di Pangkal Tembok namun sampai sekarang tidak terlaksana.

Pada tanggal 29 Juli 2016 terjadi kembali konflik di Tanjung Balai yang berdampak pada pembakaran beberapa Vihara dan Kelenteng yang dilakukan oleh etnik mayoritas sebagai puncak kemarahan etnik mayoritas dengan etnik minoritas Tionghoa. Etnik mayoritas yang religius tidak terima dengan tindakan seorang ibu dari etnik minoritas yang marah dengan pengurus masjid terganggu istirahatnya dengan suara azan di masjid tersebut. Hal itu memicu emosi dari masyarakat sekitar sehingga membakar Vihara dan Kelenteng yang berada di Tanjung Balai dengan berlandaskan agama konflik ini cepat memanas dan diprovokatori oleh etnik mayoritas dengan menggunakan media sosial sehingga dengan seketika pembakaran dilakukan. Aktor yang terlibat dalam konflik ini etnik mayoritas dari berbagai lapisan yang memiliki kecemburuan sosial atau ketidaksenangan dengan etnik minoritas Tionghoa walaupun awalnya tidak mengetahui secara pasti penyebabnya etnik mayoritas langsung berkumpul dan ikut dalam konflik tersebut.

Pasca terjadinya konflik yang terjadi dengan pembakaran Vihara dan Kelenteng ini dibuat kembali perdamaian dengan mengumpulkan pemuka agama untuk menandatangani perdamaian agar dapat menenangkan etnik mayoritas dan menangkat etnik mayoritas yang

terlibat konflik tersebut hingga terciptalah perdamaian yang bersifat sementara di Tanjung Balai. Penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah tidak sampai kepada akar permasalahan yang terjadi di Tanjung Balai sehingga kemungkinan akan terjadi konflik lanjutan di Tanjung Balai.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti merujuk pada teori konflik menurut Coser dalam Poloma (1992:110) menyatakan bahwa konflik yang realitas berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi di masyarakat mengenai obyek tertentu dan konflik yang tidak realitas bukan berasal dari tuntutan-tuntutan terhadap obyek tertentu melainkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan konflik dari salah satu pihak.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Konflik Etnik Di Tanjung Balai Dalam Tinjauan Antropologi”**. Karena terdapat berbagai permasalahan yang memicu terjadinya konflik etnis ini seperti masalah sosial, ekonomi, budaya dan agama pada masyarakat Tanjung Balai.

1.1. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan terarah, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai
2. Proses terjadinya konflik etnik Tionghoa di Tanjung Balai
3. Dampak terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai
4. Solusi yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik Tanjung Balai

1.2. Rumusan Masalah

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi konflik antar etnik dan bagaimana proses terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai?

2. Bagaimana dampak terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik Tanjung Balai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik antar etnik dan proses terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya konflik etnik di Tanjung Balai
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik Tanjung Balai

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama yang berkaitan khususnya tentang konflik etnik dengan disiplin ilmu Antropologi.
2. Memberikan sumbangsih maupun referensi untuk para peneliti selanjutnya dan pengembangan keilmuan dalam bidang Antropologi.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian-penelitian terkait kepada konflik etnik antara masyarakat mayoritas dan minoritas di masa mendatang.
2. Sebagai bahan bacaan maupun literatur para peneliti yang akan melakukan kajian yang sama di masa mendatang khususnya para mahasiswa Antropologi Sosial.
3. Sebagai bahan referensi para organisasi, pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian konflik laten yang terjadi di masyarakat.

